

NAHDATUL ULAMA
(*Peranan dan Sistem Pendidikannya*)
Oleh: Ali Rahim
(Dosen STAI DDI Pinrang)

Abstract

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan organisasi, pendidikan sebagaimana disebut dalam Undang-undang RI. No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional. Para penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU harus memiliki komitmen yang untuk terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, yang senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Keyword: Nahdlatul Ulama (NU), pendidikan, pemerintah

I. Pendahuluan

A. *Latar Belakang*

Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup manusia¹

Pendidikan merupakan yang esensial bagi manusia. Melalui manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam semesta ini demi mempertahankan kehidupannya, dapat membetuk kepribadiannya, dapat menentukan prestasi dan kapabelitas dan produktifitasnya serta dapat mengapresiasi dan memaknai kehidupan.

Atau dengan kata lain, pendidikanlah satu-satunya jalan yang dapat mengantar setiap insan mencapai peradaban dan kebudayaan gemilang.

Dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Salah satu isu penting dalam Undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.²

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdatul Ulama (NU) telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926 organisasi tersebut sangat memperhatikan pendidikan terutama keberadaan Pondok Pesantren. Dalam Anggaran Dasarnya (1927) maupun dalam Statutent Nahdlatul Ulama (1927) dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren.³

Organisasi NU merupakan mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan organisasi, pendidikan sebagaimana disebut dalam UU No. 2 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional.

Bidang usaha perjuangan NU meliputi kegiatan pendidikan, da'wah dan sosial. Tiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sebab dengan menggiatkan pendidikan maka berarti telah berda'wah dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Demikian pula melalui da'wah berarti mengembangkan pendidikan dan mengabdikan pada kegiatan sosial. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sistem NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, maka tentu saja kajian tentang hal tersebut sangat urgen dan signifikan sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan pada makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana sistem NU dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia? dan sub masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan lembaga pendidikan Nahdatul Ulama?
2. Bagaimana kontribusi lembaga pendidikan NU dan sistem dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia?

II. Pembahasan

1. Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 H. di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.⁴ Berdirinya NU diawali dengan lahirnya *Nahdlatut-tujjar* (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya *Taswirul Afkar* (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan *Nahdatul Watan* (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan.⁵ Dengan demikian, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi NU yaitu: (1) Wawasan Ekonomi kerakyata, (2) Wawasan keilmuan, Sosial Budaya, dan (3) Wawasan kebangsaan.⁶

Setelah NU resmi berdiri menjadi jam'iyah pada tahun 1926, telah banyak madrasah-madrasah yang berdiri disamping pondok pesantren yang telah lama ada dan mengakar di Indonesia. Melihat kenyataan yang ada pada saat itu, maka Mukhtar II tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Selanjutnya pada Mukhtar III tahun 1928 di Surabaya dibicarakan pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah.⁷

Salah satu program permanen Nahdatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah, yang diberi nama dengan istilah Ma'arif. Semua program kerja Nahdatul Ulama, tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai sesuatu tujuan baru, tetapi pertama-tam adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama Islam. Demikian pula urusan Madrasah atau Sekolah, pertama-tama adalah pelaksanaan perintah Agama di bidang

pendidikan dan pengajaran sekaligus merupakan keikutsertaan Nahdatul Ulama dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. Sebagai organisasi yang benar-benar tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat Kaum Muslimin Indonesia, sebagian besar madrasah atau sekolah Ma'arif Nahdatul Ulama didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri yang kemudian menggabungkan diri pada Ma'arif Nahdatul Ulama, dengan kesediaan dikordinasikan, dibimbing dan diawasi oleh Ma'arif.⁸

NU telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dan tetap berada dalam naungan NU yang diberi nama Lembaga pendidikan Ma'arif NU (LP.Ma'arif NU). Lembaga ini merupakan salah satu aparat Departementasi di lingkungan UN yang didirikan dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan NU⁹. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU yang ada ditingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

LP. Ma'arif NU didirikan merupakan cita-cita para Ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama dibawah penjajahan Belanda sangat terpuruk, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya. LP. Ma'arif NU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok pesantren. Sedangkan pesantren dalam kalangan NU dibina oleh RMI (Rabithah Ma'ahid Al-Islamiah) dimana tugas RMI adalah melaksanakan kebijakan NU dibidang sistem pengembangan pondok pesantren.

Pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi para aktifis pada kegiatan politik pada tahun 1970-an menjadi penyebab lemahnya sistem pengelolaan pendidikan NU. Lembaga pendidikan ma'arif yang bertugas mengurus dan mengola madrasah atau sekolah sejak awal tahun 1970-an sudah mengkhawatirkan penyusutan anggotanya. Pada masa itu 30 % anggotanya telah menarik diri dari lembaga NU.¹⁰

Rasa takut terhadap kegiatan politik radikal tahun 1970-an sangat membekas dan sangat menghantui dibidang pendidikan umum. Sekolah-sekolah saat itu menyembunyikan keterkaitan mereka dengan NU karena rasa takut akan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Saat itu tidak lagi

terdengar istilah MINU (Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Ulama). Mereka menggunakan nama-nama yang kurang mencolok, seperti sekolah “Wahid Hasyim” nama mantan menteri Agama.

Keputusan Nahdatul Ulama untuk kembali ke khittah 1926 dan penerimaan azas tunggal Pancasila, membawa dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan jam’iyah NU. Setelah tahun 1984, dalam upaya untuk mendapatkan kembali madrasah yang hilang atau bersembunyi dibalik nama pinjaman, maka LP. Ma’arif NU agar dengan jelas menyatakan identitasnya dan kembali mendaftarkan diri ke Lembaga Pendidikan Ma’arif. Namun permintaan tersebut hingga tahun 1987 tampaknya belum membuahkan hasil dan ini membawa akibat yang sangat buruk bagi usaha mendapatkan dana yang diperlukan untuk menyurusi sekolah-sekolah NU.

Dalam konfrensi Besar NU di Cilacap tahun 1987 di laporkan lebih 4.000 unit sekolah berada di bawah LP .Ma’arif . selanjutnya pada tahun 1991 .beberapa pengurus pendidikan di daerah melihat madrasah-madrasah mulai mendaftarkan di Ma’arif dan nama NU mulai muncul kembali dipapan nama yang di pasang di depan sekolah/madrasah .

Bila di cermati penyebab kurang berhasilnya gerakan pendaftaran kembali madrasah atau sekolah NU tersebut, paling tidak ada tiga faktor yaitu:

1. Kurangnya kemampuan finansial Lembaga Pendidikan Ma’arif NU
2. Kurangnya kemampuan pengelolaan atau manajemen
3. Tradisi para Ulama yang terbiasa bebas.¹¹

Tradisi para Kiai NU telah membuat banyak di antara mereka yang enggan mengikuti prosedur pendaftaran, meskipun menganggap diri mereka sebagai keluarga besar NU. Jadi usaha untuk mendapatkan kembali peran di bidang agama seperti dulu masih berlanjut, namun berlangsung pelan. Pada tahun 1980-an program persekolahan di sambut baik oleh pihak yang berwewenang, izin untuk membuka sekolah baru lebih mudah diperoleh.

Imam suprayogo mengemukakan bahwa:

Lembaga Pendidikan di kalangan NU sangat banyak, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. NU memiliki ribuan Pondok Pesantren, Madrasah, atau Sekolah. Lembaga Pendidikan itu mulai tingkat taman kanak-kanak hingga

Perguruan Tinggi. Termasuk pendidikan pondok pesantren, mulai dari yang paling kecil dan sederhana, yang diurus secara pribadi oleh orang-orang NU hingga yang besar dan telah berusia seratus tahun, semuanya telah dimiliki oleh NU. Lembaga pendidikan milik NU lebih banyak lagi jumlahnya adalah berbentuk madrasah, mulai dari tingkat dasar yaitu ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah.¹²

Memperhatikan perkembangan LP. Ma'arif NU di atas, tampak bahwa NU telah dan sedang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, utamanya anak-anak generasi Islam kelas ekonomi menengah ke bawah. Berbagai lembaga pendidikan telah didirikan di tengah-tengah umat, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Kontribusi Lembaga Pendidikan NU dalam pengembangan Pendidikan di Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa peran dan sumbangan NU tidaklah kecil terhadap hajat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumbangan ini tampak lebih besar lagi, jika kita melihat betapa Lembaga pendidikan NU seperti Pesantren, Madrasah, atau sekolah NU yang didirikan secara tradisional atas prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui semangat *Lillahi Ta'ala* sekarang dapat berkembang dengan pesat bahkan menjadi pilihan umat.

Agus Maimun mengemukakan bahwa kita dapat menyaksikan betapa Lembaga Pendidikan NU mampu melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang belum berhasil dijangkau oleh sekolah umum melalui sistem sekolah konvensional atau sekolah inpres¹³

Salah satu usaha NU untuk menciptakan konsistensi dan keutuhan langka perjuangannya dalam bidang pendidikan ialah menegaskan arah dan meletakkan landasan dasar kebijakan pengembangan program pendidikan di lingkungan NU. Modal pendidikan yang dimiliki NU dikembangkan sehingga dapat memainkan peranan khusus dan memberikan sumbangan berharga untuk upaya penataan kembali sistem pendidikan nasional.

Peranan maupun sumbangan tersebut pada dasarnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan yang dikembangkan NU berwatak mandiri misalnya dalam pengelolaannya, sehingga jiwa kemandirian tersebut bila dikembangkan dapat menjadi sumbangan bagi pendidikan nasional.
2. Perpaduan antara jiwa penggerakan dan keharusan mengorganisi diri.¹⁴

Imam Suprayogo mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, NU telah menepatkan Lembaga pendidikannya pada posisi strategis yaitu sebagai lembaga pendidikan alternatif, posisi yang bersifat partisipatif, dan posisi komplementer. Oleh karena itu, peran-peran NU dalam pendidikan sesungguhnya amat kaya dan strategis.¹⁵

Lebih lanjut Suprayogo mengemukakan bahwa:

Peran pendidikan NU yang bersifat alternatif adalah pendidikan pesantren yang dirintis, dikelola dan dikembangkan secara Individual oleh para ulama dan tokoh NU selama ini sudah memberikan sumbangan besar pada masyarakat, pemerintah, dan bangsa ini. Selanjutnya, peran yang bersifat partisipatif dirupakan dengan mendirikan sekolah-sekolah formal seperti madrasah, sekolah dan sekolah umum hingga Universitas yang menggunakan nama atau lambang NU. Posisi strategis lembaga pendidikan NU lainnya adalah sebagai komplementer yakni berupa pesantren, Ma'had atau Diniyah yang menyatu dengan sekolah formal termasuk lembaga pendidikan yang berstatus negeri.¹⁶

Dari sisi sosial LP. Ma'arif sangat besar terhadap pembentukan watak sosial masyarakat yang berpendidikan, hal ini dapat dibuktikan bahwa madrasah/ sekolah yang berada didaerah-daerah pedesaan atau dipelosok desa kebanyakan adalah madrasah / sekolah yang berdiri dibawah prakarsa NU. Sehingga masyarakat khususnya yang berada di daerah yang agak jauh dari perkotaan tidak kesulitan dalam mendapatkan pendidikan.

Dari budaya NU juga terus memberikan pemahaman dengan mengenalkan warisan kebudayaan dikalangan Ahlusunnah Waljama'ah dalam bentuk bacaan-bacaan atau pelajaran madrasah, kesenian-kesenian dan lain-lain khususnya bagi anak didik dan generasi muda, misalnya melalui pelajaran ke-NU an yang banyak membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan NU, dimana pada tahun 1993 mulai dimasukkan dalam tes sumatif, dengan didukung sarana dan prasana tempat belajar yang memadai yaitu pendirian madrasah-madrasah dari tingkat atas dengan melibatkan potensi warga NU dan instansi-instansi terkait. Pengaruh pendidikan di lingkungan NU semakin terasa dalam masyarakat adalah dengan berdirinya sekolah kejuruan yakni SMK Ma'arif NU pada tahun 1991 yang menghasilkan lulusan siap bekerja di masyarakat.

Nahdatul Ulama mempunyai lembaga pendidikan yang cukup banyak sebagai basis transmisi keilmuannya, yaitu pesantren. Pesantren mempunyai kekuatan tersendiri berupa nilai yang jarang dimiliki oleh lembaga lain. Dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya, pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Namun demikian, masih ditemukan pula berbagai kelemahan seperti model kepemimpinan yang masih cenderung sentralistik bertumpu kuat kharisma kiai atau otoritas perseorangan, tidak menumbuhkan kritisme santri, pengajarannya tidak terprogram dan sebagainya.

Usaha NU dalam bidang pendidikan telah tampak hasilnya dimana banyak sekolah-sekolah NU didirikan, bahkan pada tahun 2004 LP. Ma'arif yang bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan jumlah lembaga pendidikan terbanyak mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.

Lembaga Pendidikan dibawah LP. Ma'arif berjumlah 12.094 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Data Lembaga Pendidikan NU berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Ibtidaiyah	Tsanawiah	Aliyah	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA	SMK
1	Bali	41	15	10	2	0	0	0	0

2	Bangka Belitung	2	5	2	0	0	0	0	0
3	Banten	0	22	3	0	0	0	0	0
4	Bengkulu	7	9	6	0	0	0	0	0
5	DKI Jakarta	374	103	33	7	5	68	0	0
6	Jambi	10	27	3	0	0	0	0	0
7	Jawa Barat	351	235	67	13	4	69	12	11
8	Jawa Tengah	1445	458	142	13	5	11	1	44
9	Jawa Timur	4412	1228	530	35	58	67	30	39
10	Kalimantan Selatan	69	27	22	1	0	0	0	0
11	Kalimantan Tengah	4	3	1	1	1	3	0	1
12	Kalimantan Timur	19	40	17	1	0	0	0	0
13	Lampung	65	115	39	1	1	37	20	22
14	NAD	127	87	49	0	0	0	0	0
15	NTB	31	60	27	1	0	0	0	0
16	NTT	14	9	2	1	0	0	0	0
17	Papua	1	7	2	0	0	0	0	0
18	Riau	0	0	17	0	0	0	0	0
19	Sul-Sel	30	24	17	3	0	2	0	0
20	Sulut	2	8	4	1	0	0	0	0
21	Sum-Sel	30	8	3	0	5	5	3	0
22	Sumatra Utara	313	489	0	1	1	1	0	0
23	Yogyakarta	105	12	6	0	0	15	5	18
	TOTAL	7452	2991	1002	81	80	278	71	137

Sumber Data: Profil dan Direktori NU, 2009

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa secara kuantitas, lembaga pendidikan NU terbanyak adalah Madrasah Ibtidaiyah yakni sebanyak 7452 sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah SMA yakni 71 sekolah. Selanjutnya Propinsi yang terbanyak jumlah lembaga pendidikan NUnya adalah Propinsi Jawa

Timur yaitu 6.399 dan yang paling sedikit jumlahnya adalah Propinsi Papua yakni hanya 10 Madrasah. Lembaga Pendidikan NU dominan berada di Pulau Jawa.

Dari segi kualitas, di antara sekolah dalam lembaga pendidikan NU yang menonjol telah meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) NU ISO 9001-2000 yakni SMK Ma'arif NU Kebumen pada tanggal 31 Januari 2007 dan SMK NU Ma'arif Kudus pada tanggal 31 Juli 2007.¹⁷

Selanjutnya, advokasi dan penguatan perguruan tinggi NU yang pada tahun 2009 berjumlah 81 perguruan tinggi sebagaimana data pada tabel di atas merupakan tanggungjawab Asosiasi perguruan tinggi NU (APTINU) di bawah LP. Ma'arif. Perguruan tinggi NU yang telah banyak diminati masyarakat antara lain Universitas Islam Malang (UNIMA), Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Jember (UIJ), Universitas Islam Madura (UIM), Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang, Universitas Islam Sumatra (UISU), Universitas Islam Jakarta (UNISJA), Universitas NU Jogyakarta, dan Universitas Islam Madura.¹⁸ Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa NU dengan LP. Ma'arifnya telah benar-benar mempunyai nilai kontribusi yang amat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk mengisi alam kemerdekaan ini dengan mendirikan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah NU resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan yang diberi nama LP. Ma'arif NU. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok pesantren serta membentuk RMI Rabitha Ma'ahid Al-Islamiah) yang bertugas melaksanakan kebijakan NU dibidang pengembangan sistem pendidikan dan pondok pesantren.
2. Kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina oleh NU melalui

LP. Ma'arifnya mulai dari jenjang pendidikan dasar samapai pendidikan tinggi. NU telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang tersebar di wilayah Nusantara.

B. Implikasi

1. Peranan Nahdatul Ulama sebagai mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional hendaknya dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas manajemen pengelolaan lembaga pendidikan dan peningkata kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada LP. Ma'arif NU.
2. Para penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU hendaknya memiliki komitmen yang untuk terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, yang senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Endnotes:

¹Chaerul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.32.

²Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: 2006) h. 11.

³Lihat Soelaiman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi NU (Sejarah-Istilah-Amalia-Uswah)* Buku I(Surabaya: Khalista, 2007) h.133.

⁴Achmad Hasyim Muzadi dkk, *Profil dan Direktori Nahlatul Ulama dari masa ke masa* (Jakarta: PT.Yellow Multi Media, 2009) h. 34.

⁵*Ibid.*, h. 34-35.

⁶*Ibid.*, h. 80.

⁷*Ibid.*

⁸Achmad Siddiq, *Khittah Nahdiyyah*, (Cet. IV, Surabaya: Khalista, 2006) h.87-88.

⁹Achmad Hasyim Muzadi dkk, *loc.cit.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Lihat Tholha Hasan dkk, *Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama* (Cet. Pertama; Malang Jawa Timur: Pustaka Iqtishad, Maret 2010) h.6.

¹²*Ibid.*, h. 7-8.

¹³*Ibid.*, h, 48-49.

¹⁴Didik Suprianto, *artikel*, [http://batavise.co.id / category / media / republika](http://batavise.co.id/category/media/republika), Mengenal Pendidikan NU, 21 Maret 2010. Diakses September 2010.

¹⁵Tolha Hasan dkk, *op.cit.*, h.11.

¹⁶*Ibid*, h.12-14.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Didik Suprianto, *loc.cit.*

DAFTAR FUSTAKA

Chaerul Mahfud; *Pendidikan Multikultural*, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Diretoral Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, tentang Pendidikan*, Jakarta: 2006.

Fadeli, Soelaiman H., Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Buku I, Surabaya: Khalista, 2007.

Hasan Tholha dkk, *Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama*, Malang: Pustaka Iqtishad, 2010.

Muzadi, Achmad Hasyim dkk, *Profil dan Direktori Nahdlatul Ulama dari masa ke Masa*, Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2009.

Siddiq, Achmad, K.H. Khittah Nahdliyah, Cet. IV, Surabaya: Khalista, 2006.

Suprianto, Didik, *artikel*, [htt:// bataviase, co. id/category/ media /republika](http://batavise.co.id/category/media/republika), Pendidikan NU, 21 Maret 2010.